



Humanitarian Crisis : Kudeta Militer Di Myanmar Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Asean-Myanmar

Clarasari, Tri Cahyo Utomo, Marten Hanura
Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Diponegoro
E-Mail : clarasari@students.undip.ac.id

Abstract (English)

The military coup in February 2021 triggered a humanitarian crisis in Myanmar, sparking domestic resistance and international reactions. ASEAN has attempted mediation but is limited in influencing the military junta. Implications for ASEAN-MYANMAR relations include diplomatic tensions, questions about the non-intervention principle, and updates to ASEAN's foreign policy approach to regional crises. Worsening humanitarian conditions complicate resolution efforts and explore challenges and prospects for ASEAN in addressing the humanitarian crisis.

Article History

Submitted: 16 April 2024
Accepted: 25 April 2024
Published: 26 April 2024

Key Words

Military Junta, Myanmar, Military Coup, Exodus.

Abstrak (Indonesia)

Kudeta militer pada Februari 2021 menimbulkan krisis kemanusiaan di Myanmar, memicu perlawanan domestik, dan reaksi internasional. ASEAN berupaya mediasi, tetapi terbatas dalam memengaruhi junta militer. Implikasi terhadap hubungan ASEAN-MYANMAR mencakup ketegangan diplomatik, pertanyaan tentang prinsip non-intervensi, dan pembaruan pendekatan kebijakan luar negeri ASEAN terhadap krisis regional. Kondisi kemanusiaan yang memburuk memperumit upaya penyelesaian dan mengeksplorasi tantangan serta prospek bagi ASEAN dalam menangani *humanitarian crisis*.

Sejarah Artikel

Submitted: 16 April 2024
Accepted: 25 April 2024
Published: 26 April 2024

Kata Kunci

Junta Militer, Myanmar, Kudeta Militer, Eksodus.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah Singkat Myanmar dan Perjalanannya Menuju Demokrasi

Myanmar, secara resmi dikenal sebagai *Republic of the Union of Myanmar* yaitu negara yang terletak di Asia Tenggara. Dahulu dikenal dengan nama Burma hingga tahun 1989, Myanmar merupakan negara terbesar nomor 2 di Asia Tenggara dengan luas wilayah mencapai 676.578 km², yang lebih besar dari Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki populasi sekitar 55 juta jiwa dan berbatasan dengan Bangladesh dan India di barat laut, Cina di timur laut, Laos dan Thailand di timur dan tenggara, serta Laut Andaman dan Teluk Benggala di selatan dan barat daya. Ibukota negara terletak di Nay Pyi Taw, sementara kota terbesarnya adalah Yangon, yang sebelumnya dikenal sebagai Rangoon. Myanmar memiliki garis pantai yang panjang yang menghadap ke Samudra Hindia di sebelah barat, menjadikannya negara yang kaya akan keindahan alam dan warisan budaya yang kaya.¹

Myanmar dalam perjalanan menuju negara demokrasi tentu tidak mudah dan harus melalui beberapa era seperti *independence*, AFPFL, SLORC/SPDC, Ne Win, dan Reformasi.

¹ Kedutaan Besar RI Yangon Myanmar (kemlu.go.id <https://shorturl.asia/3yEiS>)





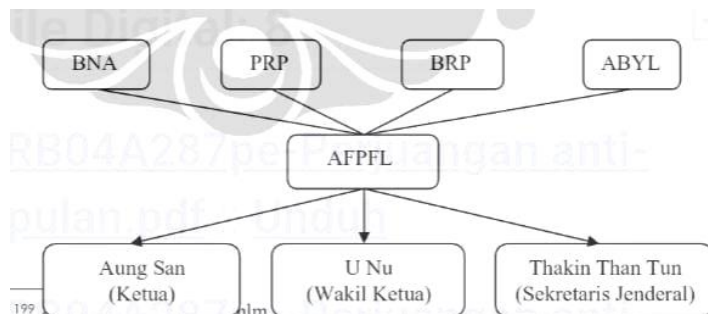
Era Independence

Era *independence* di Myanmar berawal pada tahun 1948, ketika Myanmar mendapat kemerdekaan dari Inggris. Pada masa ini, Myanmar berhasil memperjuangkan kemerdekaan dari Jepang pada tahun 1944 dan mulai mengalami perkembangan politik yang akan menarik perhatian dunia internasional. Pada era *independence*, Myanmar telah mengalami beberapa masalah internasional, seperti insurgensi komunis dan etnis. Kelompok pemberontak seperti *Communist Party of Burma* (CPB), *the Communist Party (Burma)*, *the People's Volunteer Organisation* (Yèbaw Hpyu), *the Revolutionary Burma Army* (RBA), and *the Karen National Union* (KNU).²

Pada akhir era *independence*, Myanmar mulai mengalami perilaku politik yang tidak stabil, termasuk pemisahan dalam *Anti-Fascist People's Freedom League* (AFPFL) dan kudeta *State Law and Order Restoration Council/State Peace and Development Council* (SLORC/SPDC) pada tahun 1962, yang diperintah oleh junta militer.

Era AFPFL

Anti-Fascist People's Freedom League (AFPFL) adalah era perjuangan untuk kemerdekaan kemudian menjadi aliansi politik utama di Burma yang beroperasi dari tahun 1945 hingga tahun 1958. AFPFL merupakan aliansi politik yang terdiri dari berbagai partai politik dan organisasi massa dan kelas. Aliansi ini merupakan kekuatan utama dalam perjuangan Burma untuk kemerdekaan dari Jepang pada tahun 1944 hingga 1948.³



Sumber: lib.ui.ac.id

AFPFL berawal dari *Anti-Fascist Organisation* (AFO), yang digagas oleh *Burma National Army* (BNA) yang dipimpin oleh Aung San, dan tiga sosialis dari *People's Revolutionary Party* (PRP), Kyaw Nyein, Thakin Chit, dan Ba Swe. AFO kemudian terbentuk menjadi *Anti-Fascist People's Freedom League* pada tahun 1945.⁴

Pada masa ini, Myanmar telah mengalami perjuangan untuk kemerdekaan dari Jepang pada tahun 1944 hingga 1948. AFPFL telah memperjuangkan kemerdekaan termasuk dengan *Burman insurgent groups* dan etnis minoritas seperti Mon, Pa-O, Rakhine, dan Mughideen Rakhine Muslims. Pada akhirnya, AFPFL telah mengalami pemisahan menjadi dua faksi, *Clean AFPFL* dan *Stable AFPFL*, pada bulan Juli 1958.⁵

² The Architect of Sovereignty, and Myanmar's First Independence Day (<https://shorturl.asia/h9JZ8>)

³ A. Myrna., Z. Susanto. Perjuangan Anti Fascist People's Freedom League (AFPFL) dalam mencapai kemerdekaan Burma 1944-1948 (<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=124486>)

⁴ *ibid*

⁵ T. M. Thin. Neither Inheritance nor Legacy: Leading the Myanmar State since Independence ([jstor.org](https://www.jstor.org))



Setelah pemisahan menjadi dua faksi, *Clean AFPFL* dan *Stable AFPFL*, aliansi politik ini mengalami penurunan signifikan dalam pengaruhnya di Burma. *Clean AFPFL*, yang lebih bersih dari kontroversi dan konflik internal berusaha mempertahankan visi awal AFPFL untuk kemerdekaan dan stabilitas politik. Sementara itu, *Stable AFPFL*, yang lebih cenderung terlibat dalam politik pragmatis dan kompromi mencari cara untuk memperkuat posisi politiknya meskipun terjadi perpecahan. Keberadaan AFPFL sebagai kekuatan politik yang kuat telah berakhir, meninggalkan ruang untuk dinamika politik baru dan perkembangan di Burma.⁶

Clean AFPFL dan *Stable AFPFL* mengalami pergeseran yang signifikan. Kedua faksi berusaha mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka, sering kali melalui negosiasi politik dan pendekatan yang berbeda. Namun, kemunculan faksi-faksi baru dan pergeseran dalam landscape politik menyebabkan AFPFL kehilangan dominasinya. Seiring berjalannya waktu, berbagai kekuatan politik lainnya muncul dan bersaing untuk mempengaruhi arah politik Burma. Meskipun AFPFL tidak lagi menjadi kekuatan utama, warisan dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan tetap mempengaruhi perkembangan politik di Burma selama beberapa dekade berikutnya.⁷

Era SLORC/SPDC

Era SLORC (State Law and Order Restoration Council) dan SPDC (State Peace and Development Council) di Myanmar, yang dimulai pada 18 September 1988, ditandai oleh dominasi pemerintahan militer di negara tersebut di bawah kepemimpinan Komodor Than Shwe. Meskipun slogan mereka menjanjikan "Pemerintah untuk rakyat, dimana rakyat merasa aman" pada akhirnya, era ini melahirkan SPDC pada 25 September 1997.

Pada periode ini, pemerintah militer menghadapi tantangan dari gerakan buruh dan reformasi politik yang muncul pada tahun 1988. Meskipun mereka berupaya memulihkan ekonomi pasca-perang dan krisis ekonomi, tetapi pelanggaran HAM yang sering terjadi mengganggu keamanan manusia di Myanmar.⁸

Transformasi SLORC menjadi SPDC pada 15 November 1997 menandai perubahan politik yang lebih besar di wilayah itu. Pemerintah militer terus mempertahankan kekuasaannya dengan menindas gerakan pembaruan politik yang berusaha mengurangi pengaruh mereka. Pada 30 Maret 2011, akhirnya, langkah menuju pemilihan umum dan pemulihan demokrasi dimulai. Meskipun era SLORC/SPDC meninggalkan warisan yang kompleks di Myanmar, termasuk tantangan keamanan manusia yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan pembatasan politik, langkah-langkah menuju demokrasi mulai mengubah arah politik negara tersebut.

Era SLORC/SPDC di Myanmar mencatat sejarah panjang pemerintahan militer yang berkuasa dari 1962 hingga 2011, banyak aspeknya memengaruhi kehidupan warga negara. Selama periode ini, upaya pemulihan ekonomi setelah perang dan krisis ekonomi menjadi prioritas, namun hal tersebut juga disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Meskipun pemerintah militer berusaha menegakkan keamanan dengan slogan "Pemerintah untuk rakyat", kenyataannya era ini diwarnai oleh pembatasan kebebasan politik dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Gerakan reformasi politik dan upaya memperjuangkan demokrasi bertabrakan dengan kekuatan militer yang dominan. Perubahan ke SPDC pada 1997 menandai pergeseran dalam struktur kekuasaan, tetapi pemerintah militer

⁶ A.Yan.Wei., *The Day Ne Win Was Handed Power* (irrawaddy.com)

⁷ Ibid

⁸ Carlson, M. (2016). *Painting as Cipher: Censorship of the Visual Arts in Post-1988 Myanmar*. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 31(1). 10.1353/soj.2016.0001





tetap mempertahankan kendali kuat atas negara. Tantangan terhadap konsensus regional, seperti yang dialami oleh ASEAN, juga menjadi bagian dari dinamika politik yang kompleks di Myanmar selama era SLORC/SPDC.⁹

Era Reformasi

Era reformasi di Myanmar, yang dimulai setelah masa pemerintahan otoriter SLORC pada 1988, menandai awal dari transformasi politik, ekonomi, dan sosial yang penting bagi negara tersebut. Periode ini dimulai dengan pemilu kontroversial pada tahun 2010, periode ini memberikan kemenangan bagi partai oposisi NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, meskipun hasilnya tidak diakui secara luas. Pada tahun 2011, Thein Sein, seorang mantan jenderal militer, menjadi Presiden Myanmar dan memimpin serangkaian reformasi politik dan ekonomi yang signifikan. Langkah-langkah ini termasuk pembebasan tahanan politik, pelonggaran sensor media, dan reformasi undang-undang investasi untuk menarik investasi asing. Pemilu berikutnya pada tahun 2015 menjadi tonggak penting dalam era reformasi, dengan kemenangan telak bagi NLD dan Aung San Suu Kyi yang kemudian menjadi penasihat negara. Era reformasi juga menjadi saksi kemajuan dalam kebebasan politik dan ekonomi, meskipun tantangan besar tetap ada, termasuk pengaruh yang kuat dari militer dalam politik dan ekonomi serta konflik bersenjata dengan kelompok etnis minoritas. Masa depan reformasi di Myanmar masih penuh ketidakpastian, tetapi memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan internasional untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan perubahan yang berkelanjutan dan inklusif.¹⁰

Kudeta Militer Myanmar 1 Februari 2021

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 menciptakan gejolak yang mendalam di negara tersebut. Pemicu utamanya adalah hasil pemilu November 2020, di mana Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi meraih kemenangan besar. Kudeta terjadi setelah pemerintah militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat-pejabat NLD lainnya. Alasan yang diberikan oleh militer adalah dugaan kecurangan dalam pemilu, yang telah ditepis oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar.¹¹

Kudeta ini memicu reaksi keras di seluruh negeri, dengan protes massal yang menuntut pembebasan pemimpin sipil dan pemulihan demokrasi. Namun, militer merespons protes dengan kekerasan, menyebabkan banyak korban jiwa dan ribuan orang ditangkap. Selain itu, kudeta ini juga menciptakan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan orang menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tiga tahun setelah kudeta, Myanmar masih terperangkap dalam cengkeraman junta militer, dengan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk. Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), yang terdiri dari milisi-milisi sipil, telah terlibat dalam pertempuran dengan militer di beberapa wilayah negara. Ekonomi Myanmar juga mengalami kemerosotan yang signifikan akibat kudeta, dengan sanksi internasional dan ketidakpastian politik yang terus berlanjut. Di

⁹ Myoe, M. A. (2002). JSTOR. *The National Reconciliation Process in Myanmar*, 24(2).
<https://www.jstor.org/stable/25798601>

¹⁰ Rugian, F. E., Niode, B., & Tulung, T. E. (2022). JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK. *Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021)*, 7(2).

¹¹ Yayusman, M. S. (2021). Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig*: Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar (Periode 2011 –2020). *Jurnal Unpar*, 17(1).
<https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3543.121-137>





tingkat internasional, perhimpunan bangsa-bangsa, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), telah berusaha untuk menengahi solusi damai di Myanmar. Namun, upaya-upaya tersebut belum menghasilkan hasil yang signifikan. Selama ini, komunitas internasional terus mengecam kudeta ini dan menjatuhkan sanksi terhadap rezim militer.¹²

Sementara itu, Aung San Suu Kyi masih ditahan oleh junta militer dan menghadapi berbagai tuduhan, termasuk pelanggaran rahasia negara dan penghasutan. Situasi di Myanmar terus berkembang, dan penting bagi masyarakat internasional untuk terus memantau perkembangan terkini serta mendukung upaya pemulihan demokrasi di negara tersebut.

Pemilu nasional tahun 2020 di Myanmar dipandang sebagai cerminan kehendak rakyat, meskipun ada kelemahan struktural yang terjadi. Partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi berhasil memenangkan lebih dari 80 persen dari total 1.150 kursi yang diperebutkan di berbagai tingkat, termasuk tingkat negara bagian, regional, dan serikat pekerja. Dalam pemilihan untuk majelis nasional, NLD berhasil meraih 396 dari 476 kursi, sedangkan partai yang terkait dengan militer memperoleh 33 kursi, sementara partai etnis memenangkan 47 kursi. Namun, kendala konstitusi 2008 menghambat Aung San Suu Kyi untuk menjabat sebagai presiden karena statusnya sebagai istri warga negara Inggris.¹³

Meskipun partisipasi politik terbuka bagi perempuan, partai politik menghadapi tekanan yang meningkat dari rezim militer. Terjadi penyempitan ruang politik dengan ancaman larangan bagi partai politik yang tidak bersekutu dengan militer untuk bergerak dan melakukan protes secara damai. Investigasi bermotif politik pun dilakukan terhadap partai-partai pro demokrasi dan pemimpinnya, khususnya NLD. Pada bulan Mei, Komisi Pemilihan Umum (UEC) memulai penyelidikan terhadap 93 partai politik yang terdaftar, termasuk audit keuangan. Ancaman tersebut diperkuat dengan surat pada 27 Agustus yang mengancam penangguhan registrasi partai politik jika laporan keuangan tidak disampaikan. Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam proses politik diizinkan tanpa batasan undang-undang, meskipun hambatan terkait status kewarganegaraan dan keterwakilan kelompok etnis minoritas masih menjadi kendala. Sebelum kudeta, perempuan dan anggota kelompok minoritas historis di Myanmar kurang terwakili dalam pemerintahan. Meskipun demikian, beberapa kebijakan yang berbeda dengan undang-undang dan peraturan menghambat partisipasi perempuan dalam praktik politik.¹⁴

Dampak Kudeta: Krisis Kemanusiaan, Pelanggaran HAM, dan Eksodus Pengungsi

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 telah mengakibatkan dampak yang luas dan mendalam, meresahkan berbagai aspek kehidupan di negara tersebut. Myanmar kehilangan fondasi pemerintahan sipil yang demokratis dan kembali ke bawah kendali militer, menghapus harapan akan kemajuan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah. Lebih lanjut lagi, munculnya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk tindakan kekerasan, penangkapan massal, penyiksaan, dan tindakan represif lainnya, yang menyebabkan masyarakat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian akan masa depan.¹⁵

¹² Saldy, M. (2021, 07 02). osf.io. *KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERKEWARGANEGARAAN GANDA*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ac5pr>

¹³ *Burma - United States Department of State*. (n.d.). State Department. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/burma/>

¹⁴ Ibid

¹⁵ *Sistem Peradilan Myanmar Pasca Kudeta / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (2023, January 25). Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18856&menu=2>





Dampak sosial dari kudeta ini juga sangat merugikan. Krisis kemanusiaan melanda Myanmar, dengan jutaan orang mengalami kekurangan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ratusan ribu orang mengungsi ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan dari kekerasan dan represi yang dilakukan oleh junta militer. Masyarakat hidup dalam keadaan ketakutan dan ketidakpastian yang menyelimuti segala aspek kehidupan sehari-hari. Dari segi ekonomi, Myanmar mengalami kemerosotan yang parah. Aktivitas ekonomi terhenti, bisnis dan industri tutup, dan investor melarikan diri karena ketidakpastian politik dan sanksi internasional. Akibatnya, jutaan orang terjatuh dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam.¹⁶

Dampak kudeta juga berdampak pada tingkat regional. Ketidakstabilan di Myanmar dapat memicu ketidakstabilan di Asia Tenggara, dengan potensi meningkatnya konflik dan kekerasan. Selain itu, aliran pengungsi dari Myanmar membebani negara-negara tetangga dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Ketegangan internasional pun meningkat, dengan banyak negara yang mengutuk tindakan junta militer dan menjatuhkan sanksi sebagai bentuk protes.

Dampak jangka panjang dari kudeta ini juga perlu diperhatikan. Masyarakat Myanmar mengalami trauma kolektif yang mendalam, sementara proses demokratisasi di negara tersebut dapat mengalami kemunduran yang signifikan. Masa depan Myanmar masih dipenuhi dengan ketidakpastian, dengan kekhawatiran akan kelanjutan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berlanjut.

Rumusan Masalah

Apa Implikasi Kudeta Militer Terhadap Hubungan ASEAN-MYANMAR ?

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 telah menghasilkan dampak yang signifikan terhadap hubungan antara ASEAN dan Myanmar, memunculkan sejumlah implikasi penting yang perlu dipertimbangkan. Dampak negatif yang paling mencolok adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar ASEAN, seperti demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kudeta ini juga menciptakan kebuntuan diplomatik, menghambat upaya ASEAN dalam berdialog dengan Myanmar di bawah rezim militer yang baru. Selain itu, kudeta tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan regional yang berpotensi memicu konflik dan krisis pengungsi, menggoyahkan citra ASEAN sebagai penjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.¹⁷

ASEAN telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani krisis tersebut. Pada KTT di Jakarta pada April 2021, para pemimpin ASEAN mencapai kesepakatan lima poin yang mencakup seruan untuk dialog inklusif dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Selain itu, ASEAN telah menunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar dan terus memberikan tekanan diplomatik kepada junta militer untuk mengakhiri kekerasan dan memulai dialog yang inklusif. Meskipun demikian, ASEAN juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ada ketidaksepakatan di antara negara-negara anggota tentang bagaimana menangani krisis di Myanmar, sementara junta militer masih memegang kekuasaan penuh tanpa menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan krisis.

Masa depan hubungan ASEAN-Myanmar masih dalam ketidakpastian. ASEAN terus berupaya mencari solusi damai melalui dialog dan diplomasi, menekankan pentingnya

¹⁶ Ibid

¹⁷ *Dampak Ekonomi Kudeta Myanmar Terhadap RI*. (2021, March 2). CNN Indonesia. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302103515-532-612528/dampak-ekonomi-kudeta-myanmar-terhadap-ri>





kerjasama regional dan internasional dalam menyelesaikan krisis tersebut dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.¹⁸

Bagaimana Peran HAM Internasional dalam Menangani Krisis di Myanmar ?

Peran hak asasi manusia (HAM) internasional dalam menangani krisis di Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021 telah menjadi elemen kunci dalam upaya menyuarkan keadilan dan mendukung korban pelanggaran HAM. Berbagai langkah telah diambil oleh organisasi HAM internasional untuk menanggapi situasi yang memburuk di Myanmar.

Salah satu langkah yang paling mencolok adalah pengumpulan bukti dan dokumentasi pelanggaran HAM. Misi Pencari Fakta Independen untuk Myanmar yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menjadi garda depan dalam menyelidiki dan mendokumentasikan pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan pemindahan paksa oleh junta militer. Organisasi HAM internasional seperti *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, dan *Fortify Rights* juga turut berperan dalam mengumpulkan bukti dan menerbitkan laporan yang menguatkan temuan PBB.¹⁹

Selain itu, upaya advokasi dan kampanye juga telah dilakukan oleh organisasi HAM internasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang krisis di Myanmar. Melalui berbagai platform seperti media sosial, lobi politik, dan demonstrasi, mereka telah menekan junta militer untuk menghentikan pelanggaran HAM dan membebaskan tahanan politik. Seruan mereka untuk memberlakukan sanksi internasional terhadap junta militer juga menjadi bagian dari strategi advokasi ini.²⁰

Tidak hanya sebatas pada pengumpulan bukti dan advokasi, tetapi organisasi HAM internasional juga memberikan dukungan langsung kepada korban pelanggaran HAM di Myanmar. Mereka menyediakan bantuan kemanusiaan berupa makanan, air, obat-obatan, dan tempat berlindung, serta memberikan dukungan hukum kepada para korban untuk memperjuangkan keadilan.

Dalam kerangka kerjasama dengan aktor lokal, organisasi HAM internasional bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan pembela HAM di Myanmar. Mereka mendukung dan memberikan perlindungan kepada para pembela HAM yang berani menyuarkan kritik terhadap junta militer, serta memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam memantau dan mendokumentasikan pelanggaran HAM.

Upaya HAM internasional dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Pembatasan akses yang diberlakukan oleh junta militer mempersulit pengumpulan bukti dan dokumentasi, sementara ketidakpedulian junta militer terhadap seruan dan tekanan internasional juga menjadi hambatan. Selain itu, ketidaksepakatan internasional dalam menangani krisis di Myanmar juga dapat menghambat upaya HAM internasional.²¹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Situation of human rights in Myanmar OHCHR Myanmar. (2023, Maret). *United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2023-03/myanmar-factsheet.pdf>

²⁰ *Human rights in Myanmar Amnesty International*. (n.d.). Amnesty International. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/myanmar/>

²¹ Kyaw, M. T. (2023, January 12). *Myanmar: Abuses Mount Since Military Coup*. Human Rights Watch. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.hrw.org/news/2023/01/12/myanmar-abuses-mount-military-coup>





PEMBAHASAN

Konsep Kudeta Militer

Definisi, Sejarah, dan Tipologi Kudeta

Dalam panorama politik global, kudeta muncul sebagai fenomena yang menarik perhatian, memperlihatkan kekuatan dan dinamika di balik perubahan pemerintahan yang mendadak. Definisi kudeta menjadi pijakan pertama dalam memahami esensi dari upaya pengambilalihan kekuasaan yang tidak sah tersebut. Biasanya diinisiasi oleh militer atau kelompok pemberontak, kudeta berfungsi sebagai alat untuk merebut kendali negara dari pemerintah yang sah.

Sejarah kudeta memberikan landasan yang kaya akan contoh-contoh yang menggambarkan beragam motif dan metode yang digunakan. Dari kudeta Napoleon Bonaparte di Prancis hingga kudeta Augusto Pinochet di Chili, berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan berbagai cara di mana kekuasaan dapat diambil secara paksa dan konsekuensinya terhadap perjalanan suatu bangsa.²²

Tipologi kudeta memungkinkan para pengamat untuk mengkategorikan peristiwa tersebut berdasarkan pelaku, motivasi, dan metode yang digunakan. Dalam konteks Myanmar, kudeta menjadi bagian integral dari sejarah politik negara tersebut sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Dengan kudeta militer yang terjadi pada tahun 1962 di bawah pimpinan Jenderal Ne Win hingga kudeta yang terjadi pada tahun 2021 di bawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing, Myanmar terus merasakan getaran dari upaya pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan oleh militer.

Analisis mendalam tentang kudeta di Myanmar mengungkapkan lapisan-lapisan kompleks yang mendasari peristiwa tersebut. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan sipil, keinginan militer untuk mempertahankan kekuasaan, dan ketakutan akan perubahan menjadi pendorong utama di balik upaya-upaya kudeta tersebut. Konsekuensi tragis dari kudeta ini telah terasa begitu dalam bagi rakyat Myanmar, dengan kehilangan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, penderitaan yang meluas, dan ketidakstabilan politik yang terus berlanjut. Kudeta di Myanmar tidak hanya menjadi studi kasus yang mencolok dari fenomena global kudeta, tetapi juga menyoroti kompleksitas dan dampak yang terlibat dalam perubahan kekuasaan yang mendadak dan tidak sah.²³

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kudeta

Dalam perjalanan menjelajahi dinamika yang melingkupi kudeta dan revolusi, terdapat serangkaian faktor yang menjalin dan membangun panggung perubahan. Faktor-faktor ini tidak hanya berhubungan dengan dinamika internal suatu negara, tetapi juga melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor internal dan eksternal.

Pertama, terdapat Faktor Ekonomi dan Sosial yang berpotensi menjadi katalisator utama dalam memicu ketegangan sosial yang kemudian berkembang menjadi gerakan revolusioner. Kemiskinan yang merajalela, tingkat pengangguran yang tinggi, serta inflasi yang tak terkendali dapat menciptakan ketidakpuasan yang meresap dalam masyarakat, membuka celah bagi gerakan-gerakan yang memperjuangkan perubahan melalui jalan revolusi. Krisis ekonomi dan sosial ini menjadi pemicu utama dalam menumbuhkan ketidakstabilan yang memudahkan timbulnya kudeta.

²² *Coup d'Etat Definition, Types & Historical Examples*. (2022, December 12). Study.com. Retrieved April 26, 2024, from <https://study.com/academy/lesson/coup-d-etat-history-examples-impact.html>

²³ Ibid





Kedua, Faktor Militer turut memainkan peran penting dalam dinamika kudeta. Keberadaan militer yang kuat, baik dalam hal kekuatan maupun pengaruh politik, dapat menjadi ancaman nyata bagi stabilitas politik suatu negara. Militer yang memiliki kepentingan tersendiri atau merasa terancam oleh pemerintah yang dianggap tidak kompeten, seringkali menjadi pihak yang tergoda untuk mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Selain itu, intervensi militer asing juga dapat menjadi faktor pemicu kudeta, baik melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok pemberontak maupun intervensi langsung dalam urusan internal suatu negara.

Terakhir, Faktor Eksternal menjadi variabel penting dalam menggambarkan dinamika kudeta. Intervensi asing, baik melalui dukungan finansial maupun politik, dapat menjadi katalisator dalam memicu konflik internal yang berujung pada kudeta. Negara-negara dengan kepentingan geopolitik atau ekonomi di suatu negara seringkali mendukung kelompok-kelompok pemberontak atau kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Di sisi lain, globalisasi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika politik suatu negara. Upaya-upaya untuk mendorong reformasi politik dan sosial yang sesuai dengan standar global seringkali menimbulkan ketegangan dengan kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan status quo, memicu konflik yang berujung pada kudeta.

Kudeta bukanlah fenomena yang terjadi secara sporadis atau tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan eksternal yang saling terkait dan mempengaruhi.

Dampak Kudeta Terhadap Stabilitas Politik dan Ekonomi

Tindakan kudeta merupakan gejala yang tidak dapat ditoleransi dalam konteks apapun, karena dampaknya yang serius, terutama dalam konteks genosida yang dapat terjadi sebagai hasilnya. Dalam kerangka politik dan ekonomi, kudeta membawa implikasi yang mendalam, menghantarkan negara ke dalam badai ketidakstabilan yang merusak.

Dampak politik kudeta terasa dalam beberapa aspek yang mencakup ketidakstabilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, kemunduran demokrasi, dan ketidakpercayaan internasional. Pertama-tama, kudeta dapat memicu kekacauan politik yang berujung pada kerusuhan sipil dan pemberontakan, meruntuhkan pondasi kestabilan negara dan menjadikannya sulit untuk diperintah.

Kudeta seringkali diiringi oleh tindakan represif dan penggunaan kekerasan oleh militer atau kelompok pemberontak, menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang. Hal ini tidak hanya menghancurkan nyawa dan martabat individu, tetapi juga mencoreng prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar.

Kudeta dapat mengancam kemajuan demokrasi suatu negara dengan membatalkan proses demokratis yang sedang berlangsung dan memperpanjang masa pemerintahan otoriter. Akibatnya, hak-hak sipil dan politik rakyat terancam, mengurangi ruang untuk partisipasi politik yang bebas dan berdampak pada kebebasan berekspresi.

Kudeta juga memiliki dampak yang signifikan dalam arena internasional, merusak reputasi suatu negara dan mempersulitnya untuk menjalin hubungan diplomatik serta menarik investasi asing. Ketidakpercayaan terhadap stabilitas politik dan keamanan negara pasca-kudeta dapat menghalangi upaya untuk membangun kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Jelas bahwa kudeta tidak hanya merusak stabilitas politik dan ekonomi suatu negara secara internal, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan serius dalam konteks hubungan internasional.



Prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan Komitmen Terhadap Demokrasi

Sejak pendiriannya pada tahun 1967, ASEAN telah menjadi tonggak penting dalam mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tahun 2007 menjadi landasan yang kuat, menguraikan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pilar organisasi ini.

Penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah menjadi prinsip pertama yang dipegang teguh oleh setiap negara anggota ASEAN. Dalam semangat saling menghormati, setiap negara di kawasan diharapkan untuk menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain.

Prinsip menghindari intervensi dalam urusan internal menegaskan komitmen ASEAN untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan setiap anggota. Intervensi dalam urusan domestik negara lain dianggap tidak pantas dan bertentangan dengan semangat kerjasama regional yang diusung.

Penyelesaian perselisihan secara damai menjadi pijakan untuk menyelesaikan konflik di antara negara-negara anggota ASEAN. Melalui dialog dan negosiasi, ASEAN berupaya untuk menyelesaikan ketegangan dan perselisihan tanpa resort ke tindakan yang bersifat agresif atau kekerasan.²⁴

Prinsip menegakkan hukum dan tata kelola yang baik menekankan pentingnya menjaga integritas sistem hukum dan tata kelola yang transparan dan akuntabel di seluruh wilayah ASEAN. Hukum yang kuat dan tata kelola yang baik menjadi pondasi bagi stabilitas dan kemajuan di kawasan. Demokrasi dan hak asasi manusia menjadi fokus utama bagi setiap negara anggota ASEAN. Dalam semangat kemajuan dan kesejahteraan, ASEAN mendorong setiap negara anggotanya untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan melindungi hak asasi manusia.

Kerjasama ekonomi dan sosial menjadi instrumen yang kuat untuk memperkuat integrasi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kawasan ASEAN. Melalui upaya bersama, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial serta memperkuat ikatan yang mengikat mereka sebagai satu kesatuan yang solid.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN membentuk fondasi yang kokoh bagi kerjasama dan kemajuan di kawasan Asia Tenggara, menjadikan ASEAN sebagai kekuatan penting dalam menentukan arah masa depan kawasan ini.²⁵

Prinsip-prinsip ASEAN dalam Kasus Kudeta Militer di Myanmar

Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan komitmen organisasi terhadap demokrasi. Kudeta ini telah menyebabkan hilangnya nyawa, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemunduran demokrasi di Myanmar.

ASEAN telah mengutuk kudeta tersebut dan menyerukan junta militer Myanmar untuk segera memulihkan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. ASEAN juga telah mengambil beberapa langkah untuk menekan junta militer Myanmar, termasuk:

- Penangguhan partisipasi Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN.
- Pembentukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar.
- Pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.

²⁴ *THE CHARTER ASEAN*. (n.d.). ASEAN.org. Retrieved April 26, 2024, from <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>

²⁵ Ibid





Junta militer Myanmar masih berkuasa dan terus melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Komunitas internasional harus terus bekerja sama untuk menekan junta militer Myanmar dan membantu rakyat Myanmar dalam perjuangan mereka untuk demokrasi. Prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan komitmen organisasi terhadap demokrasi memberikan kerangka kerja yang penting untuk mengatasi krisis di Myanmar. ASEAN harus terus menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian di Myanmar.

Upaya ASEAN dalam Menangani Kudeta Militer di Myanmar

ASEAN telah mengambil beberapa langkah untuk menangani kudeta militer di Myanmar yang terjadi pada Februari 2021. Upaya-upaya tersebut antara lain:

KTT ASEAN dan Kesepakatan Lima Poin

Pada April 2021, ASEAN mengadakan KTT khusus untuk membahas krisis di Myanmar. KTT ini menghasilkan "*Kesepakatan Lima Poin*" yang berisi seruan untuk:

- Penghentian kekerasan oleh semua pihak.
- Dialog yang inklusif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan.
- Penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar.
- Penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN.
- Pemberian akses bagi Utusan Khusus ASEAN untuk mengunjungi Myanmar.

Penunjukan Utusan Khusus ASEAN

ASEAN menunjuk Brunei Darussalam sebagai Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar. Utusan Khusus bertugas untuk:

- Memfasilitasi dialog antara junta militer Myanmar dan semua pemangku kepentingan.
- Membantu implementasi Kesepakatan Lima Poin.
- Melaporkan perkembangan situasi di Myanmar kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Bantuan Kemanusiaan

ASEAN bekerja sama dengan mitra internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang terkena dampak krisis. Bantuan tersebut meliputi:

- Makanan, air, dan obat-obatan.
- Bantuan tempat tinggal dan sanitasi.
- Dukungan psikologis dan sosial.

Tekanan Diplomatik

- ASEAN telah memberikan tekanan diplomatik kepada junta militer Myanmar untuk:
- Menghormati hak asasi manusia.
- Membebaskan tahanan politik.
- Melakukan reformasi demokrasi.

Kerjasama dengan Mitra Internasional

ASEAN bekerja sama dengan mitra internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan negara-negara tetangga Myanmar untuk:

- Meningkatkan koordinasi dalam memberikan bantuan kemanusiaan.
- Mendorong junta militer Myanmar untuk menghormati norma-norma internasional.



- Mencari solusi damai untuk krisis di Myanmar.

Upaya-upaya ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Junta militer Myanmar masih berkuasa dan terus melakukan tindakan represif. ASEAN perlu terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk memberikan tekanan pada junta militer Myanmar dan membantu rakyat Myanmar dalam perjuangan mereka untuk demokrasi.

Peran Organisasi Internasional dalam Kerjasama ASEAN-MYANMAR

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mendukung kerjasama antara ASEAN dan Myanmar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

- PBB memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang terkena dampak krisis politik dan ekonomi.
- PBB mendesak junta militer Myanmar untuk menghormati hak asasi manusia dan memulihkan demokrasi.
- PBB bekerja sama dengan ASEAN untuk memfasilitasi dialog antara junta militer Myanmar dan semua pemangku kepentingan.

Bank Dunia

- Bank Dunia memberikan bantuan keuangan kepada Myanmar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.
- Bank Dunia mendorong reformasi ekonomi di Myanmar untuk meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.
- Bank Dunia bekerja sama dengan ASEAN untuk mempromosikan perdagangan dan investasi di kawasan.

Dana Moneter Internasional (IMF)

- IMF memberikan bantuan keuangan kepada Myanmar untuk membantu negara tersebut mengatasi krisis ekonomi.
- IMF memberikan saran kebijakan kepada pemerintah Myanmar tentang cara mengelola ekonomi mereka secara berkelanjutan.
- IMF bekerja sama dengan ASEAN untuk memperkuat stabilitas keuangan di kawasan.

Uni Eropa (UE)

- UE memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada Myanmar untuk mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan.
- UE memberlakukan sanksi terhadap junta militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia.
- UE bekerja sama dengan ASEAN untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

- ASEAN memainkan peran sentral dalam menangani krisis di Myanmar dan mendorong junta militer Myanmar untuk memulihkan demokrasi.



- ASEAN bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.
- ASEAN mempromosikan perdagangan dan investasi di kawasan, termasuk di Myanmar.

KESIMPULAN

Kudeta militer di Myanmar telah menyebabkan ketegangan dan kontroversi di tingkat internasional, termasuk di antara anggota ASEAN. Meskipun ASEAN sebagian besar telah mengambil pendekatan non-intervensionis terhadap urusan dalam negeri negara-negara anggota, banyak pihak telah menyoroti ketidakkonsistenan dan kelemahan organisasi tersebut dalam menangani krisis politik Myanmar. Beberapa anggota ASEAN, seperti Indonesia dan Malaysia, telah menekankan pentingnya pemulihan demokrasi di Myanmar, sementara reaksi dari negara-negara seperti Thailand dan Filipina cenderung lebih bertahap dan terkadang bahkan mendukung pemerintah militer.

Hubungan Myanmar dengan negara lain telah mengalami perubahan yang signifikan sejak kudeta militer. Beberapa negara Barat telah memberlakukan sanksi terhadap rezim militer, sementara negara-negara seperti China dan Rusia lebih cenderung menjaga hubungan yang pragmatis dengan junta militer Myanmar. Hal ini mencerminkan polarisasi dalam tanggapan internasional terhadap krisis politik di Myanmar.

Kondisi di Myanmar saat ini adalah tegang, dengan protes rakyat yang berlanjut, penindasan dari pihak militer, dan eskalasi kekerasan. Pembatasan komunikasi dan kebebasan berekspresi semakin memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut. Namun, di tengah tantangan ini, masih ada semangat perlawanan dan tuntutan akan demokrasi yang terus berkobar di kalangan rakyat Myanmar.

Masa depan Myanmar tetap tidak pasti, dengan banyak faktor yang mempengaruhi arah yang akan diambil negara tersebut. Namun, harapan akan pemulihan demokrasi tetap tinggi di kalangan sebagian besar rakyat Myanmar dan komunitas internasional. Sementara itu, ASEAN dan negara-negara lain di kawasan akan terus berperan dalam upaya penyelesaian damai dan pemulihan demokrasi di Myanmar.

REFERENCES

- Anggarani, M., & Zuhdi, S. (2008). Perjuangan Anti Fascist People's Freedom League (AFPFL) dalam mencapai kemerdekaan Burma 1944-1948. *lib UI*. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=124486>
- The Architect of Sovereignty, and Myanmar's First Independence Day*. (2019, January 2). Myanmar Digital News. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.mdn.gov.mm/en/architect-sovereignty-and-myanmars-first-independence-day>
- Burma - United States Department of State*. (n.d.). State Department. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/burma/>
- Carlson, M. (2016). Painting as Cipher: Censorship of the Visual Arts in Post-1988 Myanmar. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 31(1). 10.1353/soj.2016.0001
- THE CHARTER ASEAN*. (n.d.). ASEAN.org. Retrieved April 26, 2024, from <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>





- Coup d'Etat Definition, Types & Historical Examples*. (2022, December 12). Study.com. Retrieved April 26, 2024, from <https://study.com/academy/lesson/coup-d-etat-history-examples-impact.html>
- Dampak Ekonomi Kudeta Myanmar Terhadap RI*. (2021, March 2). CNN Indonesia. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302103515-532-612528/dampak-ekonomi-kudeta-myanmar-terhadap-ri>
- Human rights in Myanmar Amnesty International*. (n.d.). Amnesty International. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/myanmar/>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia, Yangon, Myanmar*. (n.d.). Kemlu. Retrieved April 25, 2024, from <https://kemlu.go.id/yangon/id/read/profil-myanmar/1739/etc-menu>
- Kyaw, M. T. (2023, January 12). *Myanmar: Abuses Mount Since Military Coup*. Human Rights Watch. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.hrw.org/news/2023/01/12/myanmar-abuses-mount-military-coup>
- Myoe, M. A. (2002). JSTOR. *The National Reconciliation Process in Myanmar*, 24(2). <https://www.jstor.org/stable/25798601>
- Rugian, F. E., Niode, B., & Tulung, T. E. (2022). JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK. *Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021)*, 7(2).
- Saldy, M. (2021, 07 02). osf.io. *KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERKEWARGANEGARAAN GANDA*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ac5pr>
- Sistem Peradilan Myanmar Pasca Kudeta | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (2023, January 25). Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18856&menu=2>
- Situation of human rights in Myanmar OHCHR Myanmar. (2023, Maret). *United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2023-03/myanmar-factsheet.pdf>
- Than, T. M. (1993). Neither Inheritance nor Legacy: Leading the Myanmar State since Independence. *JSTOR*, 15(1). <https://www.jstor.org/stable/25798182>
- Yan, W. (2019, October 28). *The Day Ne Win Was Handed Power*. The Irrawaddy. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.irrawaddy.com/specials/on-this-day/day-ne-win-handed-power.html>
- Yayusman, M. S. (2021). Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig*: Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar (Periode 2011 –2020). *Journal Unpar*, 17(1). <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3543.121-137>



LAMPIRAN

Turnitin

Turnitin interface showing a document titled "Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional, Kelas 17, Diajukan untuk Penugasan UTS" from Universitas Diponegoro Semarang. The document is being checked for plagiarism, and the Turnitin interface displays a 13% match overview. The document is submitted by Dosen Pengampu: Drs. Tri Cahyo Utomo, M.A.

Match Overview

13%

Currently viewing standard sources

View English Sources

Matches

1	id.cenlamontessori.org	Internet Source	1%
2	en.wikipedia.org	Internet Source	1%
3	journal.unpar.ac.id	Internet Source	1%
4	journal.aihii.or.id	Internet Source	1%
5	Submitted to The Unive...	Student Paper	<1%
6	Submitted to De La Sall...	Student Paper	<1%

Page: 1 of 23 Word Count: 5212

Text-Only Report High Resolution On